

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran suatu negara merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Sejak ditetapkannya Peraturan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih baik dari tahun-tahun sebelum diterbitkannya undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan keterbukaan, akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan *good governance* dalam penyelenggaraan negara (Susanto, 2006).

Anggaran negara disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Pada dasarnya APBN sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara, pengelolaannya diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas, transparan dan kewajaran. Anggaran belanja negara ditetapkan dalam konstitusi. Konstitusi yang mengatur pelaksanaan anggaran negara yaitu Undang-Undang APBN yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap tahunnya. Anggaran negara dilaksanakan oleh

semua departemen dan kementerian/lembaga. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Oleh sebab itu, penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis sehingga dana anggaran yang dibuat pada akhirnya tidak menggagalkan anggaran yang telah disusun.

Menurut Halim (2014:104), penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Secara umum penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik atau entitas pemerintahan penyerapan anggaran diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu.

Apabila tidak mencapai target penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Carlin, 2014).

Permasalahan mengenai lambatnya penyerapan anggaran di pemerintah daerah, kementerian/lembaga kerap kali dituding sebagai buruknya kinerja birokrasi. Penyerapan anggaran sendiri memang penting untuk mendorong terciptanya *multiplier effect* terhadap ekonomi.

Penyerapan anggaran merupakan gambaran keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan anggaran. Permasalahan lambatnya penyerapan anggaran pemerintah daerah/kementerian/lembaga di Indonesia terjadi disetiap tahunnya. Namun saat ini yang sering terjadi adalah lambatnya proses penyerapan anggaran, dimana pada awal tahun penyerapan anggaran rendah akan tetapi mengalami pelonjakan yang sangat signifikan pada akhir tahun (Rifai *et al*, 2016). Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah/lembaga. Permasalahan yang sama dihadapi oleh seluruh instansi pemerintah/lembaga, salah satu diantaranya adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur.

LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur merupakan Lembaga Penyiaran Publik di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mempunyai kewenangan di bidang penyiaran. Selain melaksanakan tugas penyiaran publik, juga melakukan pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari APBN. LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur melaksanakan APBN berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam satu tahun anggaran dari Januari s.d. Desember. LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur telah berkomitmen untuk merealisasikan anggaran secara merata

sepanjang tahun sebagaimana yang terdapat dalam Halaman III DIPA yaitu Rencana Penarikan Dana (RPD) oleh satuan kerja dalam satu tahun yang dijabarkan secara bulanan. Tetapi dalam realisasi pelaksanaan anggaran, rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada awal tahun dan tingginya penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Kondisi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia mempunyai kondisi yang hampir sama, seperti yang diistilahkan oleh Bank Dunia yaitu lambat di awal tahun namun menumpuk di akhir tahun (Halim, 2017). Penyerapan anggaran berhubungan dengan kinerja anggaran dan merupakan kemampuan pemerintah/lembaga dalam menggunakan sumber daya keuangan yang ada. Anggaran juga menjadi sangat penting dan relevan, karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah/lembaga yang dikaitkan dengan fungsi dalam memberi pelayanan.

Berikut tabel realisasi penyerapan anggaran pada LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur:

Tabel 1.1
Realisasi Penyerapan Anggaran TVRI Stasiun NTT
Tahun Anggaran 2019 – 2022

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Triwulan	Jenis Belanja			Serapan Anggaran (Rp)	Presentase (%)
			Pegawai	Barang	Modal		
2019	15.689.778.000	I	1.145.570.323	1.103.138.961	494.100.000	2.742.809.284	17,48
		II	1.697.507.746	1.786.451.431	216.223.000	3.700.182.177	23,58
		III	1.618.990.562	2.065.192.645	330.014.225	4.014.197.432	25,58
		IV	1.487.144.350	2.775.929.078	484.566.250	4.747.639.678	30,26
		Jumlah	5.949.212.981	7.730.712.115	1.524.903.475	15.204.828.571	96,91
2020	21.357.112.000	I	1.145.601.204	1.165.127.474	37.250.000	2.347.978.678	10,99
		II	1.683.456.360	1.252.605.424	174.887.000	3.110.948.784	14,57
		III	1.670.878.416	1.725.240.341	339.497.500	3.735.616.257	17,49
		IV	7.014.010.493	2.452.150.164	1.946.030.600	11.412.191.257	53,44
		Jumlah	11.513.946.473	6.595.123.403	2.497.665.100	20.606.734.976	96,49
2021	18.322.618.000	I	1.485.555.419	933.588.336	-	2.419.143.755	13,20
		II	2.478.519.530	1.780.902.887	832.445.000	5.091.867.417	27,79
		III	1.711.363.264	1.609.763.911	374.701.600	3.695.828.775	20,17
		IV	2.032.736.472	2.484.949.036	683.330.350	5.201.015.858	28,39
		Jumlah	7.708.174.685	6.809.204.170	1.890.476.950	16.407.855.805	89,55
2022	20.239.036.000	I	1.318.599.615	1.367.073.586	124.163.938	2.809.837.139	13,88
		II	2.226.649.580	1.849.082.321	814.011.450	4.889.743.351	24,16
		III	2.051.604.931	2.062.715.494	720.942.000	4.835.262.425	23,89
		IV	1.999.437.741	3.143.720.046	1.601.052.581	6.744.210.368	33,32
		Jumlah	7.596.291.867	8.422.591.447	3.260.169.969	19.279.053.283	95,26

Sumber: diolah dari TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Menurut Mahmudi (2019:141), kriteria efektivitas kinerja keuangan adalah sebagai berikut: 100% sangat efektif, 90% - 100% efektif, 80% - 90% cukup efektif, 60% - 80% kurang efektif, dibawah 60% tidak efektif. Dalam pelaksanaan anggaran pada LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang memenuhi target kinerja anggaran

adalah pada tahun 2019 sebesar 96,91%, tahun 2020 sebesar 96,49% dan tahun 2022 sebesar 95,26%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 89,55%. Hal ini disebabkan pada Triwulan I, yaitu pada jenis belanja modal tidak ada penyerapan anggaran sama sekali dikarenakan, terdapat revisi anggaran yang menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran belanja modal dan adanya kontrak pengerjaan yang dicatat di Triwulan I, namun realisasi anggarannya dilakukan pada Triwulan II, sehingga penyerapan anggaran pada belanja modal tercatat pada Triwulan II. Nilai penyerapan anggaran pada LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ini tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan, dengan kata lain tidak habis dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kematangan penyerapan anggaran dalam perencanaan anggaran.

Penelitian Tofani (2020), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran ada 6 (enam) yaitu: beban kerja, pemanfaatan teknologi informasi, perencanaan, administrasi, sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya penelitian Safpremi (2022), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa. Sedangkan penelitian Oktalisa (2020), faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah kualitas sumber daya manusia, regulasi, perencanaan anggaran dan komitmen manajemen. Keterlambatan penyerapan anggaran menyebabkan tingkat penyerapan anggaran menjadi tidak merata, sehingga berimplikasi terhadap lambatnya realisasi program dan kegiatan lembaga.

Faktor lemahnya perencanaan anggaran dapat menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lambat, karena adanya anggapan bahwa anggaran yang diusulkan tidak semuanya akan disetujui. Akhirnya mengusulkan anggaran yang lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memikirkan kebutuhan riil yang ada di lapangan. Perencanaan anggaran dapat diartikan sebagai suatu rancangan sebagai pengendali dan penentu arah yang akan ditempuh oleh suatu organisasi/lembaga untuk mencapai suatu tujuan organisasi/lembaga. Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam siklus pengelolaan keuangan kementerian/lembaga, perencanaan berintegrasi dengan penganggaran sebab *output* dari perencanaan adalah Daftar Isaian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan selama tahun anggaran, sehingga keberhasilan pengelolaan keuangan kementerian/lembaga dimulai dari tahapan perencanaan. Tetapi perencanaan anggaran yang kurang matang dan tidak akurat akan menyebabkan instansi/lembaga untuk melakukan revisi anggaran (Seftianova dan Adam, 2013). Selanjutnya Nugroho (2015), menjelaskan bahwa perencanaan dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling krusial dalam konteks pengelolaan keuangan, sebab seluruh kegiatan yang perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari perencanaannya. Menurut Iqbal (2018), semakin

baik perencanaan anggaran maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat pula. Dengan kata lain semakin matang pengelola anggaran dalam mengelola dan merencanakan, maka program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Alfarisi (2017), menyatakan bahwa secara signifikan penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor perencanaan, pelaksanaan anggaran dan koordinasi dengan instansi lain. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Nengsih (2021), menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di OPD Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan hasil penelitian dari Rifai et al (2016), yang menunjukkan bahwa perencanaan, regulasi, eksekusi program/kegiatan atau pelaksanaan, desentralisasi, koordinasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap terlambatnya daya serap anggaran. Dan hasil penelitian Salwah (2019), bahwa perencanaan anggaran secara parsial tidak memengaruhi penyerapan anggaran.

Gambaran perencanaan anggaran yang ada di TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur di dalam penyerapan anggaran, disebabkan oleh konsep perencanaan yang tidak matang dari masing-masing user dalam penentuan anggaran, sehingga berdampak kepada program kerja yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dimana penyerapan anggaran tidak sesuai dengan apa yang

direncanakan sebelumnya, hal ini mengharuskan terjadinya proses revisi anggaran, baik diawal, pertengahan maupun diakhir tahun.

Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di tingkat Satuan Kerja (Satker), terutama sumber daya manusia pengelola keuangan. Menurut Sutrisno (2009), sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Selanjutnya Amiruddin (2009) dalam Alimuddin (2018), sumber daya manusia pada proses anggaran, erat kaitannya dengan kapasitas dan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 8 secara implisit menyebutkan bahwa “desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia”. Dengan kata lain sumber daya manusia adalah faktor determinan keberhasilan desentralisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi/lembaga. Menurut Mathis dan Jackson (2006), Sumber Daya Manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Selanjutnya menurut Zarinah (2015), Sumber Daya Manusia menjadi

unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Walaupun menggunakan peralatan yang canggih dan handal namun tanpa dibarengi peran aktif sumber daya manusia yang memadai, peralatan tersebut tidak akan bekerja secara maksimal. Menurut Iqbal (2018), semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin kompeten pengelola anggaran, maka tujuan organisasi seperti penyerapan anggaran lebih mudah terealisasi.

Hasil Penelitian Rini dan Suguharti (2020), menemukan bahwa peningkatan keahlian dan pengetahuan sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan daya serap anggaran. Hasil penelitian dari Tofani (2020), mengemukakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2019), adalah sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana anggaran dan pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan, kemampuan, motivasi dan persepsi yang baik. Adapun keadaan sumber daya manusia yang ada di TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur adalah terbatasnya sumber daya manusia, dimana kurangnya jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan khususnya pada bagian keuangan, adanya perangkapan pekerjaan atau tugas dan pola mutasi yang tidak merata. Hal ini mengakibatkan semakin tidak baik sumber daya manusia

yang ada, maka akan memperlambat penyerapan anggaran, sebaliknya jika sumber daya manusia semakin baik maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel tingkat pendidikan pegawai TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur:

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD	3
2.	SMP	6
3.	SMA/SMK	53
4.	D3	12
5.	S1	45
6.	S2	4
Total		123

Sumber: diolah dari TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur mempunyai kualifikasi pendidikan ditingkat SMA/SMK sebanyak 53 orang, pendidikan S1 sebanyak 45 orang, pendidikan D3 sebanyak 12 orang, pendidikan SMP sebanyak 6 orang, Pendidikan S2 sebanyak 4 orang dan pendidikan SD sebanyak 3 orang. Dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang mayoritas SMA/SMK dan masih ada kualifikasi pendidikan SMP dan SD, dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dikerjakan, karena bidang pekerjaan yang dikerjakan tersebut tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh. Jika hal ini tidak dibarengi dengan pelatihan, sosialisasi, bimbingan

teknis, diklat dan kegiatan sejenis lainnya untuk meningkatkan kompetensi dari masing-masing pegawai.

Faktor yang juga mempengaruhi penyerapan anggaran adalah pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Selanjutnya Bastian (2010:263), Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tugas organisasi sektor publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahannya menjadi Perpres Nomor 04 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai upaya mempercepat pelayanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perpres tersebut memberikan mandat pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *E-Procurement (E-Proc)*, yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara online yang merupakan salah satu jalan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelum diberlakukan *E-Proc* memerlukan waktu yang cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya daya serap anggaran. Apabila dikaitkan dengan pengadaan/pembangunan fisik, dampak keterlambatan penyerapan anggaran ini

berakibat pada terlambatnya manfaat yang akan diterima dan dirasakan oleh pengguna jasa layanan. Selain itu, karena terbatasnya waktu yang diberikan kepada rekanan dalam pengadaan barang/jasa cenderung akan memengaruhi kualitas barang/jasa yang diterima.

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Tofani (2020), menyimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian serupa dari Ramadhani (2019), mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan hasil penelitian dari Puluala (2021), mengatakan bahwa pengadaan barang/jasa tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Pengadaan barang/jasa memiliki peranan yang sangat krusial dalam suatu organisasi karena berperan sebagai alat untuk menggunakan anggaran dalam jumlah yang signifikan dengan tujuan memperoleh barang, jasa dan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai misi atau tujuan organisasi. Hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran dalam pengadaan barang/jasa di TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur adalah perencanaan pengadaan barang/jasa dari masing-masing user tidak sesuai dengan kebutuhan, masing-masing user belum memahami mekanisme pengadaan barang/jasa, barang-barang pengadaan khususnya barang-barang

broadcasting/penyiaran/IT mayoritas masih menggunakan barang import, adanya tumpang tindih pengadaan barang oleh satker pusat dan daerah sehingga adanya pendobelan barang dengan merk/type yang sama karena kurang komunikasi dari satker pusat, adanya selisih harga yang signifikan antara daerah NTT dengan daerah di pulau Jawa sehingga perencanaan anggaran yang dilakukan relatif lebih tinggi, serta terbatasnya penyedia atau rekanan sebagai pihak ketiga dalam pengadaan/barang jasa.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki persepsi yang positif dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Sebaliknya pegawai dengan komitmen organisasi yang rendah akan memiliki perhatian yang rendah untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan cenderung mencoba memenuhi kepentingan pribadi. Komitmen dalam organisasi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dengan organisasi. Menurut Mowday (2001), berpendapat bahwa komitmen organisasional merupakan identifikasi dari keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya Latuheru (2006), mengemukakan bahwa individu yang memiliki ikatan emosional terhadap organisasi akan memicu tumbuhnya komitmen

organisasional sehingga individu akan berusaha mencapai tujuan perusahaan dan mengesampingkan kepentingan pribadi.

Menurut Sianipar (2014), komitmen organisasi adalah keputusan karyawan untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi dengan sepenuh hati menerima tujuan organisasi dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan organisasinya. Berdasarkan uraian tersebut, komitmen organisasi merupakan kesediaan karyawan untuk mengutamakan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan memberikan kontribusi yang besar untuk mencapai terwujudnya tujuan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Alumbida (2019), memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah Kabupaten Talaud. Hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ani (2020), komitmen berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian Dewi (2017), menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, tetapi komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan Marsontio (2022), memperoleh hasil penelitian komitmen organisasi dapat memoderasi perencanaan kualitas sumber daya manusia, administrasi, dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran, tetapi komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pelaksanaan penyerapan anggaran.

Komitmen Organisasi merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa adanya komitmen, organisasi akan sulit mencapai tujuan. Komitmen organisasi yang dijalankan oleh para pegawai TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur adalah memiliki kemauan mencapai tujuan organisasi dimana adanya keinginan untuk memberikan kontribusi dengan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada, memiliki motivasi untuk bekerja efektif dan aktif berpartisipasi dalam pertemuan maupun diskusi tim kerja.

Penyerapan anggaran ini merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti, terkait adanya inkonsistensi beberapa hasil penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini terfokus pada pengaruh variabel perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa, komitmen organisasi dan penyerapan anggaran pada TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran?
4. Apakah pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran?
5. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran?
6. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran?
7. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa, komitmen organisasi dan penyerapan anggaran pada TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran.
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran.
5. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
6. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran.
7. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah.
2. Bagi LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam penyerapan anggaran di LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.